



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TOTOK ISJIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
3. NHK : **920502**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **329.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m²/43 m² di KAB / KOTA BLORA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 56.000.000
2. Tanah Seluas 1.464 m² di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 73.200.000
3. Tanah Seluas 1.630 m² di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 81.500.000
4. Tanah Seluas 990 m² di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 49.500.000
5. Tanah Seluas 1.394 m² di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 69.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **115.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G/ F601R / MOBIL PENUMPANG Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA ACHIM21B04 A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOTOR, HONDA GL 1581DF M/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **---**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	449.900.000
III. HUTANG	Rp.	12.900.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	437.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.